

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Film dokumenter *Di Balik Frekuensi* (2013) mengisahkan perjuangan Luviana, mantan produser stasiun televisi *MetroTV* yang memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen perusahaan media di tempatnya bekerja. Kasus sengketa ketenagakerjaan itu berakhir di Pengadilan Hubungan Perindustrian (PHI) dengan menghukum *MetroTV* membayar pesangon 16 bulan gaji kepada Luviana. Pasca kasus itu, tidak banyak yang tahu bagaimana kehidupan Luviana selanjutnya yang dipecat karena berencana membentuk serikat pekerja di *Metro TV*, meminta peningkatan kesejahteraan karyawan dan menuntut independensi di ruang redaksi.

Permasalahan yang disajikan dalam film dokumenter tersebut adalah potret buruknya sistem manajemen perusahaan pers dalam industri media kapitalistik. Konflik antara pekerja dan perusahaan media atau pemilik modal menjadi salah satu persoalan krusial pekerja jurnalis di Indonesia dan merupakan fenomena gunung es karena sebagian besar sengketa antara pekerja jurnalis dengan manajemen tidak banyak muncul ke permukaan. Pekerja media tidak bersedia terbuka membela hak-haknya dan cenderung memilih diam untuk menghindari konsekuensi yang diterima karena menyuarakan haknya.

“Jurnalis itu kan orang yang paling gagah di depan, orang yang tahu informasi paling pertama dan mengabarkannya. Mereka bisa menuliskan segala macam hal, dari ekonomi-moneter hingga pelanggaran HAM. Tapi ketika ada persoalan riil di depannya, temannya di-PHK misalnya, mereka nggak ngapa-ngapain. Itu yang kemudian membuyarkan pikiran saya yang menganggap bahwa teman-teman jurnalis pintar. Mereka jadi orang paling berani ketika menulis berita, tapi (menjadi) orang paling takut menghadapi kenyataannya (sendiri).” (Wawancara Remotivi dengan Luviana, 3 Desember 2012)

Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2010 menyebutkan, pemutusan hubungan kerja terjadi sejak lama seperti saat krisis moneter 1998 yang mengakibatkan banyak perusahaan media terpuruk akibat menurunnya daya beli dan tingginya harga kertas. Diperkirakan 4.489 ribu karyawan atau 70 persen pekerja media kehilangan pekerjaan terkena dampak krisis (Manan, 2010:8). Bagi pekerja media khususnya pekerja jurnalis, dampak dari krisis bermacam-macam. Walaupun jumlah pastinya tidak diketahui, sebagian besar adalah pemutusan hubungan kerja. Misalnya, sekitar 30 jurnalis dan karyawan *Lampung Post* dirumahkan, 100 jurnalis dan karyawan *Indonesia Times* kehilangan pekerjaan dan *RCTI* merasionalisasi 20 % dari total 800 pekerjanya dengan PHK.

Perusahaan media juga mengurangi jumlah halaman dan menaikkan harga eceran agar tetap bertahan dan tidak gulung tikar. Tercatat media nasional umumnya mengurangi empat halaman dari sebelumnya. Seperti *Kompas* menjadi 20 halaman, *Republika* menjadi 16 halaman, *Media Indonesia*, *Bisnis Indonesia* dan *Jawa Pos* dari 24 menjadi 16 halaman, *Majalah Femina* bahkan memotong 50 % halamannya. Di tahun 1998, *Harian Kompas*, *Republika* dan *Suara Pembaharuan* menaikkan harga eceran dari Rp 700 menjadi Rp 1.100, *Media Indonesia* dari Rp 700 menjadi Rp 1.500. Dalam catatan AJI, setidaknya 36 media melakukan sejumlah upaya untuk bertahan di tengah badai krisis moneter. Data yang tidak tercatat kemungkinan lebih besar.

Setelah krisis moneter berlalu, statistik kasus sengketa ketenagakerjaan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers tetap bermunculan. Hingga semester pertama 2010, Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia mencatat sejumlah pemecatan massal di perusahaan media terus terjadi (Manan, 2010:9).

Kasus Ketenagakerjaan di Sektor Media

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Deskripsi Kasus
1	2015	4	Perselisihan pekerja Harian Jurnas dengan perusahaan karena menutup perusahaan
			Pekerja Bloomberg TV Indonesia menolak pembayaran pesangan yang dicicil hingga 18 kali oleh perusahaan
			Jakarta Globe menghantikan edisi cetak dan mengurangi jumlah pekerja
			Sejumlah pekerja Harian Bola di-PHK sepihak karena penutupan edisi harian.
2	2010		Pemecatan 217 pekerja stasiun televisi Indosiar
			Pemecatan 144 pekerja Harian Berita Kota setelah koran itu diakuisisi Kelompok Kompas Gramedia (KKG),
			Pemecatan 50-an pekerja harian sore Suara Pembaruan dan media anggota Grup Lippo lainnya
			Pemecatan massal karyawan stasiun televisi ANTV
3	2009	14	Pengaduan karyawan stasiun televisi RCTI karena likuidasi divisi news dan pemindahan ke Sun TV yang belum memiliki izin siaran. Mereka menolak dimutasi meski ada jaminan tidak ada perubahan gaji dan posisi.
			Adri Irianto mengadukan Majalah Security ke LBH Pers karena upah sebagai kontributor foto belum dibayar
			Jurnalis Global TV yang mengadu karena diberi surat peringatan tiga kali dan akhirnya di-nonjob-kan
			Jurnalis mengadu karena di-PHK karena mengajukan cuti
			Sejumlah karyawan Indosiar mengadukan pemotongan dana pensiun oleh pihak manajemen yang besarnya tidak sesuai ketentuan.
4	2008	14	Sebagian besar pengaduan bersifat konsultasi hukum terkait dengan kesejahteraan
5	2003-2005	22	Rata-rata 7 kasus per-tahun, pengaduan kasus ketenagakerjaan

Sumber: Laporan Tahunan AJI Indonesia 2010-2016 diolah penulis

Tren pemutusan hubungan kerja dan sengketa antara pekerja dan perusahaan masih menghantui bisnis media. Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, pada medio 2013 hingga tengah medio tahun 2015 menangani 12 kasus ketenagakerjaan di sektor media yang didominasi sengketa PHK, faktor perusahaan tidak sehat, perusahaan media besar yang mempekerjakan jurnalis dengan model *outsourcing* (alih daya) yang menyalahi Undang-

Undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dan ketidakcocokan pekerja terhadap manajemen perusahaan (Manan, 2015: 67-75).

Rasionalisasi juga dialami dalam industri media di Indonesia dengan kemunculan tren digitalisasi media. Bidang Ketenagakerjaan AJI dalam Laporan Tahunan AJI 2016 menyoroti kondisi industri media massa tahun 2015 hingga pertengahan 2016 dengan berhenti beroperasinya sejumlah media seperti *Harian Jurnas*, *Bloomberg TV Indonesia*, *Sinar Harapan* yang kesulitan pendanaan dan *Harian Bola* Kompas Gramedia Group yang memutus hubungan kerja sejumlah pekerjanya karena masalah finansial. Koran-koran regional seperti *Selebes*, *Inilah Sulsel*, *Harian Jambi* juga gulung tikar. Sebagian besar kasus PHK berakibat adanya persoalan ranah hukum karena perusahaan tidak memberikan hak pekerja sesuai ketentuan undang-undang. Lembaga independen yang memantau industri media, The Nielsen Company, menguatkan rincian media yang berguguran selama 2015, yaitu sebanyak 54 unit surat kabar dan majalah gulung tikar. (Bambani&Manan, 2016:76).

Di tahun 2017, AJI mencatat kasus terbesar pemutusan hubungan kerja dalam industri media terjadi pada sekitar 300 karyawan *Koran Sindo* yang menerima surat PHK dari perusahaan karena penutupan tujuh Biro *Koran Sindo* di berbagai daerah di Indonesia. PHK di bawah Grup MNC juga menimpa 42 karyawan PT Media Nusantara Informasi Global (PT MNIG) yang menerbitkan *Tabloid Genie* dan *Mom and Kiddie*. Kompas Gramedia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 karyawan dari berbagai divisi di majalah sebagai bagian dari upaya efisiensi (Bambani&Manan, 2017:6-17).

Isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan menjadi isu sentral pekerja pers dalam industri media. Upaya kompromi dan melawan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai pekerja sudah dilakukan meski kesadaran pekerja media untuk memperjuangkan kesejahteraan sangat

terlambat dibandingkan para pekerja di sektor industri lainnya. Pada 2015, AJI mendorong konsolidasi gerakan buruh media dengan bergabung dalam Forum Pekerja Media Indonesia (FPMI) yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi dan serikat pekerja media di Indonesia untuk membangkitkan kesadaran pekerja media mendapatkan hak dan upah layak.

Kampanye “Jurnalis adalah Buruh” digulirkan dengan mengeluarkan standarisasi Upah Layak Jurnalis di tiap kota di Indonesia dengan menyesuaikan Komponen Hidup Layak (KHL) agar jurnalis menjalankan tugas jurnalistiknya lebih profesional. Seperti pada 2015, AJI Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) merekomendasikan upah layak sebesar Rp 6.510.400 per bulan untuk tingkatan jurnalis lajang dengan masa kerja satu tahun. Kenyataannya, hingga kini hanya segelintir perusahaan pers yang memberikan upah sesuai standar kelayakan. Temuan hasil survei AJI Jakarta dan FSPMI terhadap 60 perusahaan media menunjukkan jurnalis mendapat upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 juta/bulan (Manan, 2015:76). Upah layak Jurnalis versi AJI tahun 2014 sebesar Rp 5,7 juta dan tahun 2013 sebesar Rp 5,4 juta. Kenaikan relatif sedikit dibandingkan dengan besaran upah layak tahun sebelumnya. Upah layak tahun 2012 versi AJI Jakarta sebesar Rp 5,2 juta, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp 4,7 juta.

“Saya sudah berumah tangga mendapat gaji Rp 5,5juta dengan masa kerja 10 tahun. Waktu itu standar upah layak sebesar Rp 5,2juta per bulan. Stasiun televisi milik konglomerat media nasional hanya memberikan upah kurang dari Rp 3 juta/bulan. Bahkan pernah terjadi PHK besar-besaran dengan alasan efisiensi, karyawan tetap dijadikan outsourcing.”(Wawancara Remotivi dengan Luviana).

Upah Riil Jurnalis di Jakarta 2013*

TV		Cetak		Online		Radio	
Nama Media	Gaji	Nama Media	Gaji	Nama Media	Gaji	Nama Media	Gaji
RCTI	3,1	Jakarta Post	5,3-5,8	Rakyat Merdeka	3,5	KBR 68H	4.4
Metro TV	3,9-4,2	Tempo	4,3	Detik.com	3,6	Sindo Radio	2,5

Beritasatu	3	Media Indonesia	4,3	Inilah.com	2,8-2,9	Elshinta	2,8
Liputan6.com	3,5-4,5	Republika	3,2	Antarane.ws.com	4,2	I-Radio	3,7
MNC TV	-	Koran Sindo	2,5-3	Okezone.com	2,65	RRI	3,05
TV One	2,7	Bisnis Indonesia	5,3	Vivanews.com	3,5		
Global TV	3,5	Warta Kota	3	Jurnal Parlemen.com	4,4		
Tempo TV	4,4	Sinar Harapan	3,6-3,7	Merdeka.com	3,5		
TVRI	3,8-4	Koran Jakarta	3,8	Hukumonline.com	3,3		
Kompas TV	4,5			Harian detikepaper	3,3		
Anteve TV	4			Kompas.com	4-4,5		
Trans TV	3,3			Tribunnews.com	3,05		
Bloomberg TV	4-8			Majalah Detik	3,7		

*Gaji per bulan dalam juta rupiah

Sumber: Laporan Tahunan AJI Indonesia 2015 (Manan, 2015:77)

Di setiap laporan tahunan, AJI Indonesia menyoroti dan mencatat kondisi kesejahteraan jurnalis yang tidak kunjung membaik. Hasil survei sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa upah kerja jurnalis di Indonesia tergolong memprihatinkan. Hasil riset di tahun 2015 terhadap jurnalis kontributor di 8 kota di Indonesia menunjukkan sebagian besar kontributor media massa mendapat upah di bawah Rp 3 juta per bulan. Pendapatan minim membuat jurnalis mencari pekerjaan sambilan untuk menambah pemasukan, mulai dari membuka jasa foto dan video pernikahan, jasa katering, dosen, editor, *event organizer*, aktivis lembaga swadaya masyarakat/ormas, dan wirausaha. Pekerja jurnalis kontributor memenuhi kebutuhan hidup dengan ditopang istri atau suami.

Riset kondisi pekerja media juga dilakukan AJI Kota Semarang yang disampaikan dalam Focus Group Discussion Serikat Pekerja Media 2015 menunjukkan kondisi serupa. Data temuan 58,8% pekerja media mendapat upah antara Rp 1,5 juta - Rp 3 juta. Pekerja dengan tunjangan penuh hanya 11,7%, padahal hampir 50 % pekerja media sudah berkeluarga. Fakta lain hasil survei 17 media lokal dan nasional juga menunjukkan jurnalis mampu memenuhi kebutuhan karena berhemat, mempunyai pendapatan sampingan dan hidup ditopang dari penghasilan istri atau suami yang bekerja.

Undang-Undang Tenaga Kerja juga tidak spesifik mengatur hak pekerja jurnalis dengan jelas. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 mengenai pengupahan menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak sesuai dengan kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Jurnalis itu tidak dikhususkan. Mereka masuk dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi, hak mereka sama dengan hak buruh. Termasuk dalam hal gaji dan yang lainnya. Yang saya perjuangkan bukan jurnalis, tapi semuanya. Hak-hak pekerja.” (Wawancara Remotivi dengan Luviana, 3 Desember 2012)

Menurut Luviana, Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku secara umum. Padahal jurnalis adalah profesi yang memiliki standar khusus yang pekerjaannya diatur undang-undang dan kode etik profesi sehingga aturan dalam undang-undang tersebut dinilai tidak relevan. Di sisi lain, pemilik modal cenderung tidak memedulikan hal tersebut karena beranggapan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Perusahaan pers memilih mengurangi anggaran alokasi sumber daya dengan menekan atau membayar upah pekerja di bawah standar dan mengalokasikan dananya pada hal-hal yang menguntungkan perusahaan.

Efek bola salju mengenai permasalahan kesejahteraan jurnalis dan kesenjangan dalam dunia kerja berimbas pada banyak hal, seperti praktik amplop, suap, rangkap pekerjaan,

pekerjaan sambilan (*side job*), alih profesi, hingga melibatkan diri dalam politik praktis baik secara langsung dengan menjadi anggota legislatif maupun tidak langsung dengan menjadi bagian dari pemerintah atau tim sukses dalam pesta demokrasi. Aliansi Jurnalis Independen menemukan nama-nama jurnalis aktif tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DPS) anggota DPR atau DPRD. Pada 2013, tiga anggota AJI mengundurkan diri dari keanggotaan setelah terlibat dalam Tim sukses calon kepala daerah, menjadi anggota KPUD, calon anggota legislatif partai tertentu dan ada pekerja jurnalis yang diam-diam terlibat dalam struktur organisasi kemasyarakatan, partai politik, staf ahli menteri, DPR, gubernur, hingga presiden yang akhirnya memengaruhi objektivitasnya dalam kerja jurnalistik.

Selain isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan, keterkikisan kebebasan pers juga menjadi fenomena yang terus menguat dalam industri media kapitalis. Perusahaan media dan atau pemilik modal mempunyai keberpihakan saat pemilihan kepala daerah, seperti proses pemilihan Kepala Daerah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Memasuki tahun 2013, aspek politik mendominasi dan berpuncak pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Beragam peristiwa politik merusak “garis api” ruang redaksi dan mencederai perlindungan profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Standar Perlindungan Profesi Jurnalis, yang menyebutkan “Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.” Dalam Pasal 9 juga disebutkan “Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku”.

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sudah mengatur independensi media yang harus ditaati lembaga penyiaran. Pasal 36 menyebutkan, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh

mengutamakan kepentingan golongan tertentu”. Pasal 11 Pedoman Perilaku Penyiaran diatur bahwa “Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.”

Kepemilikan media dengan model media privat oleh segelintir pemilik modal menumbuhkan akses pada konglomerasi dan oligarki media. Di Indonesia dapat dilihat pada kepemilikan media dengan jaringan di seluruh Indonesia yang masing-masing memiliki lebih dari satu media dengan beragam bentuk dan jenis baik media cetak, televisi, radio maupun siber.

Penelitian Anett Keller (2009) terhadap independensi media menemukan fakta bahwa sistem kepemilikan dan struktur redaksional dalam perusahaan media berpengaruh pada tingkat otonomi redaksi dan isi berita. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pekerja jurnalis yang bekerja pada media dengan pemilik yang tidak mempunyai latar belakang jurnalistik menerima intervensi dominan dari pemilik modal untuk kepentingan kapital seperti contoh yang paling nyata dari jenis media massa televisi yang disinyalir tidak independen. Kepemilikan *TV One* oleh Aburizal Bakrie dan *MetroTV* yang dimiliki Surya Paloh. Keduanya merupakan aktor politik yang bertarung pada Pemilu 2014.

Penelitian Yanuar Nugroho, Putri dan Laksmi (2012) menyebutkan, industri penyiaran sarat dengan praktik monopoli karena kepemilikan media di Indonesia mengalami pemusatan terpolarisasi yang menguasai jaringan media dengan aneka platform. Sebagai contoh, MNC Group dengan tiga televisi nasional yakni *RCTI*, *MNC TV* dan *Global TV* serta tv berbayar, 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan Radio *Sindo Trijaya*. Grup *Jawa Pos* memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk Radar Grup. Kompas Grup berekspansi dengan mendirikan televisi berjaringan *Kompas TV*, 12 penyiaran radio di bawah

anak perusahaan Radio *Sonora*, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Selain bisnis vertikal, pemilik modal juga mempunyai bisnis horizontal yang saling berkait dan terintergrasi dengan bisnis media.

Media memang menciptakan ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat tapi itu hanya hasil konstruksi kepentingan pemiliknya. Temuan Nugroho dan kawan-kawan (2012) menunjukkan karakter perkembangan industri media terkonsentrasi dan terus berlangsung untuk menyampaikan konten dan informasi yang bertujuan melayani kepentingan publik, mencari profit dan melayani kepentingan pemilik atau mempertahankan integritasnya. Konstelasi ini terus berlangsung di setiap kelompok media.

Merlyna Lim (2011) juga menunjukkan sebagian besar pemilik grup media itu aktif di partai politik, dekat dengan penguasa dan petinggi partai. Setidak-tidaknya terdapat 12 grup usaha media di Indonesia. Yakni, Media Nusantara Citra Group (Hary Tanoesoedibjo), Mahaka Group (Erick Tohir), Kelompok Kompas Gramedia (Jakob Oetama), Jawa Pos Group (Dahlan Iskan), Media Bali Post Group (Satria Narada), Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja, Lippo Group (James T Riady), Bakrie & Brothers milik Anindya Bakrie, Femina Group milik Pia Alisyahbana dan Mirta Kartohadiprodjo, Media Group (Surya Paloh), Mugi Reka Aditama (MRA) Group milik Dian Muljani Soedarjo, dan Trans Corporation (Chairul Tanjung). Grup media lain yang juga kuat adalah Tempo Group (Goenawan Muhammad) dan Bisnis Indonesia Group (R Sukamdani S Gitosardjono).

Perkembangan media massa di Indonesia dalam satu dekade terakhir tumbuh sangat pesat. Bisnis media bukan lagi monopoli sejumlah pengusaha karena konglomerat juga merambah bisnis media. Sebut saja perusahaan rokok Djarum yang membeli Kaskus (forum komunitas terbesar di Indonesia), Lippo Group masuk dalam bisnis media di bawah Berita Satu Media Holdings dan Chairul Tandjung dengan bendera Trans Corporation.

Konsentrasi kepemilikan media oleh segelintir orang menunjukkan kemudahan media dibentuk dan digunakan sesuai kepentingan pemilik untuk memengaruhi publik. Kondisi ini setidaknya membuktikan bahwa media menjadi mekanisme yang digunakan kaum pebisnis dan politik untuk mencapai kepentingan mereka sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnis media tanpa mengindahkan etika media. Hal ini sejalan dengan argumen Bagdikian (2004) dan Joseph (2005) (dalam Nugroho et al, 2012:37) bahwa tujuan investasi dalam industri media kemungkinan besar untuk keuntungan ekonomi dan politik para investor, daripada memenuhi *raison d'être* media, yakni menyediakan informasi tepercaya dan sudut pandang yang pluralistis kepada publik sekaligus arena bagi keterlibatan masyarakat.

Industri media dalam sistem ekonomi kapitalis tidak memosisikan pekerja jurnalis secara istimewa sebagai garda depan dalam melakukan tugas jurnalistik untuk membawa dan memberikan informasi kepada publik. Jurnalis lebih diposisikan sebagai pekerja (buruh) yang harus tunduk pada perintah pemilik modal / pemilik media untuk melakukan kerja jurnalistik memenuhi kebutuhan industri informasi dan bekerja tidak mengedepankan prinsip jurnalisisme karena lebih berorientasi pada kepentingan kapital pihak-pihak yang berkepentingan di seluruh rangkaian kerja jurnalistik untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan politik sebesar-besarnya.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam *The Elements Of Journalism, What Newspeople Should Know and The Public Should Expect* (2001) merumuskan elemen-elemen jurnalisisme yang memosisikan pekerja jurnalis sebagai pencari kebenaran dan dalam bekerja harus loyal kepada warga, disiplin verifikasi, menjaga independensinya, menjadi pemantau independen dari kekuasaan. Pekerja jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi membuat berita yang komprehensif proporsional, dan tetap harus mendengarkan nuraninya. Dalam menjalankan profesi secara independen, pekerja jurnalis harus mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang berlandaskan pada moral dan etika profesi

sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalitas kerja. Di Indonesia, kode etik profesi disahkan oleh lembaga yang memayungi pers, yaitu Dewan Pers. Organisasi kewartawanan juga mengeluarkan pedoman etik berupa Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bagi anggotanya, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kebebasan pers juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sehingga dalam pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers harus menghormati hak publik, profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat demi kepentingan publik.

Pekerja jurnalis yang bertahan dan melindungi independensi dari tekanan pemilik media karena kepentingan bisnis dan politik menyebabkan keterasingan dari komunitas tempat jurnalis itu berada (Kovach&Rosenstiel;2001:63). Keterasingan atau alienasi yang dimaksudkan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai sebuah kondisi di mana produk berita, jurnalis dan media semakin menjauh dari publik karena tidak mengakomodasi dan mengutamakan kepentingan publik. Istilah keterasingan ini menunjukkan pada suatu pemisahan dan jarak.

Bagi Karl Marx, kerja adalah pengembangan kekuasaan dan potensi manusiawi yang sejati. Kerja merupakan suatu kegiatan sosial yang melibatkan orang lain secara langsung di dalam produksi, atau karena orang lain memberi alat-alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan mentah untuk pekerjaan, atau karena mereka menikmati buah dari kerja kita. Kerja tidak hanya mentransformasi manusia individu tetapi juga mentransformasi masyarakat. (Ritzer, 2012: 86)

Menurut pemikiran Marx tersebut, kerja jurnalis tidak berdiri sendiri karena pekerja jurnalis membutuhkan penyedia alat produksi sebagai penunjang utama pekerjaannya. Konsep Marxis mengakui dua kelas yakni kelas borjuis (pemilik modal) sebagai penguasa alat produksi dan kelas proletar (pekerja) yang dieksploitasi dengan menggunakan sarana alat produksi milik kaum borjuis. Kaum kapitalis memiliki alat-alat produksi dan memiliki produk hasil akhirnya.

Dalam konteks industri media, perusahaan media sebagai entitas ekonomi lebih menganggap jurnalis sebagai pekerja yang menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki pemodal sebagai penguasa dalam sistem pengelolaan media massa.

Berbagai persoalan yang membelit pekerja jurnalis seperti ketenagakerjaan, kesejahteraan, tekanan pekerjaan, profesionalitas dan kualitas produk karena kepentingan ekonomi politik menyebabkan pekerja jurnalis tidak dapat menjadi manusia yang harus bekerja secara bebas dan universal sebagai sarana merealisasi diri dan mewujudkan eksistensi. Pekerjaan yang dilakukan harus bermakna yang tercermin dalam kebanggaan, kepuasan dan kegembiraan kerja tanpa diliputi keterpaksaan sebagai syarat untuk dapat bertahan hidup.

1.2. Perumusan Masalah

Secara normatif dalam menjalankan pekerjaannya seorang pekerja jurnalis harus independen, bebas dari campur tangan siapa pun termasuk dari kepentingan ekonomi maupun politik pemilik media dengan menegakkan garis api (*firewall*) di ruang redaksi. Pekerja jurnalis menjaga independensi dan profesionalitas karena tanggungjawabnya tidak hanya sebatas menghasilkan produk jurnalistik sebagai hasil akhir rangkaian proses produksi berita, tetapi bertanggungjawab terhadap dampak (*impact*) dari produk berita atau pemberitaan yang disajikan kepada publik melalui media massa. Namun perkembangan bisnis media yang mengarah pada industri media kapitalis mengubah wajah media massa karena masuknya campur tangan pemilik modal / pemilik media di dalam kebijakan redaksional.

Pada konteks penelitian ini adalah adanya Tarik menarik kepentingan di dalam ruang berita yang terjadi antara pekerja jurnalis dan pemilik modal. Tarik menarik kepentingan yang tinggi dalam industri media kapitalis di Indonesia dapat dilihat dari berbagai tekanan intervensi

kekuasaan ekonomi dan politik sehingga pekerja jurnalis cenderung dituntut menjadi pekerja yang patuh mengikuti kebijakan perusahaan media dan tidak dapat bekerja sesuai standar profesionalitas dan etika jurnalistik. Intervensi yang paling nampak jelas ada dalam proses produksi berita baik di ruang redaksi terutama pada saat penentuan produk berita dan objek liputan yang harus mengikuti semua arahan dan perintah yang menguntungkan pemilik modal. Dalam struktur keredaksian melalui personil di redaksi yang mempunyai kewenangan dalam sebuah kebijakan pemberitaan mengambil peran untuk memengaruhi pekerja jurnalis agar patuh terhadap keputusan pemilik modal sehingga muncul pergolakan dalam diri pekerja jurnalis pada saat menjalankan pekerjaannya (Wawancara dengan Luviana 14 Juni 2015).

Dalam industri media kapitalis, kerja-kerja di keredaksian juga rawan dengan eksploitasi. Pekerja jurnalis mengalami eksploitasi kerja karena pengelolaan pengorganisasian perusahaan yang timpang dengan menekan pekerja untuk bekerja seproduktif mungkin karena anggapan kewajaran pekerja jurnalis terbiasa bekerja tanpa mengenal waktu dan siap bekerja dalam tekanan untuk bekerja secara terus menerus. Di sisi lain, industri media kapitalis cenderung mengabaikan hak-hak pekerja ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pemenuhan kesejahteraan pekerja.

Peneliti juga melihat ada kecenderungan pekerja jurnalis melakukan tindakan nir etik dalam proses jurnalistik demi kepentingan kapital perusahaan media / pemilik modal dan pribadi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tuntutan kebutuhan ekonomi pekerja jurnalis menyebabkan dampak besar bagi diri pekerja jurnalis yang memilih mementingkan periuk nasi daripada menjalankan profesi jurnalis secara profesional dan independen sesuai dengan kode etik profesi.

Karl Marx menyebut tentang pekerja yang tidak bisa menikmati pekerjaannya sebagai hilangnya hakikat hidup yang paling utama karena pekerjaan yang membahagiakan manusia adalah bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Industri media dengan sistem kerja kapitalis telah mengasingkan pekerja jurnalis dengan dirinya sendiri dalam hakikatnya sebagai manusia, mengasingkan diri dengan idealisme dan profesionalismenya, mengasingkan dengan lingkungan sosialnya, dan mengasingkan dengan publik. Kondisi kerja jurnalis tersebut terjadi tanpa disadari sehingga menyebabkan pekerja jurnalis yang bekerja terperangkap dalam situasi penindasan yang seolah-olah wajar atau alamiah dan menjadi sebuah kewajaran.

Beragam persoalan yang muncul tersebut menjadi sangat penting diungkap agar kepentingan pemilik media dan industri media kapitalis tidak mencederai kerja jurnalis. Penelitian ini menjadi semakin penting dilakukan ketika dihadapkan dengan ironi antara kebebasan pers dengan praktik jurnalistik dalam industri media kapitalis yang masuk dalam kajian ekonomi politik media. Pekerja jurnalis yang terjebak dalam jerat industri media kapitalis tidak dapat memenuhi standar profesi kerja menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dari permasalahan penelitian tersebut, peneliti tertarik mengungkap permasalahan pokok dan mempertanyakan hal-hal seperti berikut:

1. Bagaimana pekerja jurnalis bekerja dalam industri media kapitalis di Indonesia?
2. Bagaimana praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis di Indonesia?
3. Bagaimana dampak praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis terhadap kerja jurnalis?
4. Bagaimana pekerja jurnalis bersikap (membebaskan diri) untuk bertahan bekerja dalam industri media kapitalis?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana pekerja jurnalis bekerja dalam industri media kapitalis di Indonesia. Tujuan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian terkait dengan kinerja pekerja jurnalis selama menjalankan profesinya.
2. Mendeskripsikan bagaimana praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis. Tujuan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian terkait bagaimana hubungan kerja pekerja jurnalis dengan produk berita, hubungan kerja pekerja jurnalis dengan aktifitas produksinya, hubungan kerja pekerja jurnalis dengan rekan kerja dan hubungan pekerja jurnalis dengan dirinya sendiri (potensi diri), serta cara-cara media kapitalis melakukan intervensi dan eksploitasi dalam menjalankan / mengelola bisnis media.
3. Mendeskripsikan dampak praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis terhadap kerja jurnalis. Tujuan ini diharapkan menjawab akibat / dampak hubungan kerja pekerja jurnalis dalam melaksanakan aktivitas jurnalistiknya di industri media kapitalis.
4. Mendeskripsikan bagaimana pekerja jurnalis bersikap (membebaskan diri) untuk bertahan dalam industri media kapitalis. Tujuan ini diharapkan menjawab permasalahan penelitian terkait sikap pekerja jurnalis menghadapi intervensi dan eksploitasi berbagai kepentingan kapital.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian ekonomi politik media dan permasalahannya yang terkait dengan pelaku media, dalam hal ini pekerja jurnalis dan perusahaan media dalam pengelolaan bisnis media kapitalis di Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pada : (1) pengembangan konsep teori dari Karl Marx pada industri media kapitalis, dan (2) penggunaan pendekatan fenomenologi transcendental dalam pemikiran kritis.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan media dan perbaikan pengelolaan bisnis media di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi pers sebagai pilar ke empat demokrasi yang mempunyai tanggungjawab pencerahan kepada publik dalam menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial selain sebagai fungsi ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi ruang kontemplasi bagi pekerja jurnalis untuk memegang teguh profesionalisme dalam menjalankan profesinya dengan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi organisasi pers dan pemerintah untuk melindungi kerja jurnalis dari berbagai intervensi, eksploitasi dan penindasan kapital melalui aturan yang lebih berkeadilan.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu mengajak publik lebih memahami pers dan kerja jurnalis dalam industri media kapitalis, serta mengajak publik untuk meliterasi diri sehingga dapat memilah dan lebih kritis terhadap informasi yang tersaji di media.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metode tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Denzin dan Lincoln (1994:107) mendefinisikan:

“A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principle.”

Suatu paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar (atau yang berada di balik fisik yaitu metafisik) yang bersifat pokok atau prinsip utama. Paradigma adalah “cara melihat” realitas yang perlu dimengerti dalam konteks kegunaannya sehingga peneliti dapat menentukan pijakan teoritis dan metode penelitian yang digunakan (Rahardjo, 2009:13).

Penelitian membutuhkan sebuah landasan filosofis yang sesuai dengan konteks untuk membimbing peneliti. Dengan mengacu pada hal tersebut, penelitian ini menggunakan cara pandang kritis untuk menjawab tujuan penelitian, yakni dengan mencoba memahami sistem yang dianggap benar, struktur kekuatan, keyakinan dan ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu yang muncul dalam struktur. Paradigma kritis digunakan untuk menganalisis, membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Memahami penindasan

dalam menghapus ideologi semu dan bertindak mengatasi kekuatan yang menindas (Littlejohn, 2012:68).

Paradigma kritis bertujuan mengubah dunia yang timpang karena didominasi kekuasaan yang menindas kelompok bawah (Guba&Lincoln, 1994:113). Secara filosofis, Guba&Lincoln menyebutkan persoalan mendasar dalam penelitian meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan metodologis. Namun di luar itu, terdapat elemen aksiologi yang berkaitan dengan posisi *value judgments*, etika atau pilihan moral peneliti dalam melakukan suatu penelitian dan kegiatan ilmiah (1994:195).

Aspek ontologis dalam paradigma kritis menekankan pada realisme historis. Realitas diasumsikan bersifat semu dan lentur karena terbentuk oleh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, etnik dan gender yang mengkristal secara historis (Denzin dan Lincoln, 2000:255). Realitas penuh berisi konflik dan diatur oleh *hidden underlying structure* karena itu penelitian ini mencoba memahami realitas yang ada di balik kerja jurnalis dan praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis di Indonesia dengan menggali dan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkontribusi membentuk realitas tersebut seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks penelitian ini maka posisi peneliti ingin mencoba memahami menganalisis, membuka kondisi-kondisi kerja yang menindas yang dialami pekerja jurnalis dalam industri media kapitalis yang berada dalam dominasi kepentingan kapital. Dari pemahaman tersebut maka peneliti ingin memunculkan kesadaran kritis bahwa praktik jurnalistik dan kerja jurnalis dalam industri media kapitalis di Indonesia merupakan sebuah kemunduran praktik nilai-nilai jurnalisisme yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi pers. Kesadaran kritis lain juga dibangun agar pekerja jurnalis dapat menghapus ideologi semu dan mampu bertindak mengatasi kekuatan kapital pemilik modal yang menindas untuk mewujudkan praktik jurnalisisme yang lebih baik.

Denzin dan Lincoln (1994:136) menyebutkan epistemologis dalam paradigma ini bercirikan transaksional dan subjektif, serta nilai-nilai yang dimiliki peneliti yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Peneliti diasumsikan berhubungan secara interaktif dengan objek yang diteliti dengan nilai-nilai yang dimiliki peneliti. Secara metodologis, penelitian ini bersifat dialogis dan dialektis. Sifat transaksional penelitian ini membutuhkan sebuah dialog yang bersifat dialektik antara peneliti dengan subjek penelitiannya agar dapat menguak dan mengubah ketidaktahuan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran mendalam dan dapat menerima struktur-struktur yang diantaranya secara historis sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah ke dalam kesadaran. Peneliti dapat melakukan pendekatan dengan subjek penelitian melalui dialog. Secara aksiologis, nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai Intelektual transformatif (*transformative intellectual*).

1.5.2. State of The Art

Penelitian ini mencoba mencari sudut pandang penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang bentuk tesis, buku dan jurnal yang menjadi *state of the art*, yakni:

1. Tesis yang ditulis Ali Musfofa pada tahun 2014 yang berjudul “Struktur Dominasi Media Pada Wartawan”. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi kritis dengan metode diskriptif analitis menggunakan teori strukturasi Giddens. Hasil penelitian menunjukkan, struktur media pada independensi wartawan bersifat dominan bahkan “menindas” yang diwujudkan dalam kebijakan media secara internal dan eksternal (Musfofa, 2014).

2. Tesis berjudul “Relasi Jurnalis dengan Sumber Berita pada Komodifikasi Reportase Investigasi (Studi Kasus 'Berita Investigasi' di Trans TV)”, tesis Irwan Siregar pada tahun 2012 ini menggunakan studi ekonomi politik media untuk mengungkap konspirasi jurnalis dan narasumber dalam tayangan investigasi di televisi (Siregar, 2012).
3. Buku yang ditulis berjudul Ishadi SK pada tahun 2014 berjudul “Media dan Kekuasaan, Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto” ini merupakan hasil disertasinya yang dibukukan. Buku ini mengangkat bagaimana dominasi kekuasaan pemilik media / perusahaan media sangat memengaruhi konten produk berita / pemberitaan dan pekerja jurnalis di ruang redaksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori ekonomi politik media dalam paradigma kritis (Ishadi, 2014)
4. Buku “Potret Intervensi di Balik Bilik Redaksi” yang dirilis tahun 2014 oleh Aliansi Jurnalis Independen Semarang ini merupakan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif terhadap independensi kerja jurnalis. Buku mengungkap tingginya intervensi internal dan eksternal dalam ruang redaksi menghasilkan temuan yang menunjukkan jurnalis mengalami intervensi yang tinggi dalam kerja jurnalistiknya (AJI Semarang, 2014).
5. Penelitian Sunarto pada tahun 2014 berjudul “Maskulinisasi Pekerja Wanita dalam Industri Media” yang mendeskripsikan pengalaman profesional pekerja wanita dalam industri media lokal di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Hasil penelitian menemukan adanya kekerasan struktural dan simbolik terhadap wanita dalam bentuk diskriminasi kerja dan produk media yang menempatkan wanita sebagai kelompok minoritas (Sunarto, 2014).
6. Dedy Ilham Permana dalam penelitian berjudul “Keterasingan di Dunia Kerja: Studi atas Aktivitas Kolektor di Sebuah Lembaga Pembiayaan Kredit di Jombang Jawa Timur

yang dibukukan pada tahun 2013 dalam ontologi buku #1 Edisi Tradisi Mikrososiologi berjudul “Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan Individu”. Penelitian melalui fenomenologi Schutz dengan teori alienasi Karl Marx dan dari kebebasan Erich Fromm digunakan untuk mengungkap bagaimana kerja kolektor, sistematisasi perusahaan pembiayaan menjalankan roda perusahaan dan melacak dimensi keterasingan pekerja. Hasil penelitian menyimpulkan arus industri memunculkan gejala alienasi manusia baik dari dirinya sendiri maupun lingkungannya. (Permana, 2013).

7. Buku berjudul “Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika” yang ditulis Anett Keller pada tahun 2009 dari hasil tesisnya mengenai struktur ekonomi dan cara kerja perusahaan media dengan membandingkan 4 perusahaan media dengan kepemilikan berlatarbelakang pengalaman di bidang jurnalisme dan tanpa pengalaman jurnalisme. Hasil penelitian menemukan bahwa pemilik media yang tidak memiliki latar belakang jurnalisme lebih masif melakukan intervensi terhadap jurnalis untuk melancarkan kepentingan kapital perusahaan media/pemilik (Keller, 2009).
8. Penelitian Kyung-Hee Kim pada tahun 2006 berjudul “Obstacles to the Success of Female Journalists in Korea” ini merupakan penelitian analisis isi yang dirilis dalam jurnal yang menjelaskan bagaimana jurnalis perempuan di Korea mengalami alienasi diri. Hasil penelitian menunjukkan jurnalis perempuan di Korea secara horizontal dan vertikal terpinggirkan karena pembagian kerja berdasarkan gender.

State of the art tersebut digunakan peneliti untuk menambah perspektif dan mewarnai penelitian sejenis tentang praktik jurnalistik dan kerja jurnalis yang menjadi bagian dalam pengelolaan manajemen bisnis media dalam industri media kapitalis. Selama ini peneliti melihat tema kajian pelaku media dalam hal ini pekerja jurnalis sebagai bagian penting dalam

bisnis media masih minim karena memang tidak mudah melakukan penelitian pekerja jurnalis. Kondisi riil persoalan pekerja jurnalis memberikan peluang bagi peneliti untuk berkontribusi membahasnya dari sudut pandang normatif kerja jurnalis dan fokus pada bagaimana praktik jurnalistik memengaruhi dan berdampak pada kerja jurnalis yang mengarah pada perubahan sikap kerja jurnalis yang bekerja dalam industri media kapitalis.

1.5.3. Teori Ekonomi Politik Media

Dalam *The Political Economy of Communication* (2009:24), Vincent Mosco menguraikan ekonomi politik adalah kajian tentang relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya-sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi seperti surat kabar, buku, video, film, dan audien adalah sumber daya utama. Pendekatan ekonomi politik menekankan bahwa masyarakat kapitalis terbentuk menurut cara-cara dominan dalam produksi yang menstrukturkan institusi dan praktik sesuai logika kapitalis. Teori ekonomi politik secara umum digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara sistem ekonomi, sistem politik dan sistem komunikasi dalam struktur kapitalisme global. Teori ini berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media dan ideologi media yang tercermin dalam isi media.

Secara luas, ekonomi politik merupakan kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial (Mosco, 2009:2). Mosco menyajikan tiga konsep penting dalam kajian ekonomi politik media, yaitu komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi. Sedangkan Golding dan Murdock (Mosco, 2009:29-35) fokus pada pendekatan terhadap ide landasan ekonomi politik untuk menggambarkan ekonomi politik, yakni:

1. Perubahan sosial dan sejarah. Bersifat historis karena berusaha memahami perubahan sosial dan transformasi sejarah yang berkaitan dengan momentum ekonomi, politik, budaya, dan ideologi kehidupan sosial dengan dinamika yang berakar dari konflik sosial ekonomi. Proses-proses tersebut adalah pertumbuhan media, perluasan jangkauan korporasi, komodifikasi, perubahan peran negara dan intervensi pemerintahan.
2. Analisis totalitas sosial atau holistik. Ekonomi politik membahas persoalan yang berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Dikaitkan dengan Marxian untuk memahami hubungan ekonomi dan politik, sosial dan budaya secara luas.
3. Berorientasi pada filsafat moral. Dominan moral, kultural atau spiritual menjadi subjek sentral analisis. Kajian ekonomi politik media tidak bebas nilai karena didasari kepentingan memperjuangkan keadilan, kesamaan, dan kepentingan umum.
4. Praksis. Kajian ekonomi politik media diarahkan pada kepentingan praktis yang tercermin dalam tindakan perjuangan kelas. Praksis penting untuk memandu teori dan melihat pengetahuan sebagai produk berkelanjutan antara teori dan praktik.

Mosco mengemukakan varian atau aliran pemikiran dalam ekonomi politik, yakni (1) neo-konservatisme, (2) ekonomi politik kelembagaan, (3) ekonomi-politik Marxian, (4) ekonomi-politik feminis, dan (5) ekonomi-politik lingkungan (Mosco, 2009:50-61).

1. Neo-konservatisme. Salah satu ciri pemikiran mazhab konservatif adalah adanya perdebatan bahwa ekonomi utama berkonsentrasi pada perilaku ekonomi untuk memperluas prinsip analisis ekonomi untuk semua kegiatan sosial, politik, dan budaya

(Basu, 2000; Klein, 1999; Stigler, 2003). Pendekatan ini berfokus pada kuasa kegunaan (*utility*) dan kuasa kegunaan (*custom and order*).

2. Ekonomi Politik Kelembagaan. Bermula dari pemikiran ekonomi neoklasik yang mempertahankan struktur organisasi ekonomi sebagai kekuatan utama dalam produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa. Analisis struktur organisasi menggabungkan sejarah kelembagaan, sosiologi, aktivitas birokrasi, penilaian, kendala teknologi dan kesempatan, dan pengaruh kebiasaan sosial, hukum, dan budaya pada pembangunan sosial nilai. Ukuran nilai sosial dilihat dengan pemahaman tentang batasan adat sosial, status sosial, dan lembaga sosial pada semua perilaku, termasuk perilaku pasar.
3. Ekonomi Politik Marxian. Dalam analisisnya, memandang konsentrasi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kapitalis dan indikator krisis. Melalui teori nilai kerja, eksploitasi kelas sosial, dan perjuangan, konsentrasi kekuasaan ekonomi, imperialisme dan krisis. Kapitalisme menimbulkan pertentangan kaum borjuis dengan kaum proletar.
4. Ekonomi Politik Feminis. Muncul dari peran aktivitas isu-isu spesifik seperti kurangnya perhatian terhadap pekerjaan, rumah tangga dan kebutuhan mendesak untuk memperluas bidang ekonomi politik dengan menyerukan agar pekerja rumah tangga diperhitungkan dan menggunakan posisi perempuan untuk elemen dasar ekonomi.
5. Ekonomi Politik Lingkungan. Secara umum pendekatan lingkungan melihat kepentingan ekonomi politik dalam gagasan totalitas sosial dengan memasukkan totalitas alam kehidupan organik. Pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi telah mengangkat isu lingkungan menjadi perhatian khusus yang diarahkan pada

kesenjangan antara persepsi bahwa ada teknologi ramah lingkungan dan semakin banyak bukti ancaman bagi kesehatan manusia karena toksisitasnya (*toxicity*).

Sistem komunikasi publik dalam perspektif ekonomi politik secara makro Peter Golding dan Graham Murdock dalam Curran dan Gurevitch (1991:16) menjelaskan, dua perspektif, yaitu (1) ekonomi politik liberal yang berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan memilih komoditas-komoditas yang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkan, (2) ekonomi politik kritis yang melihat persoalan ekonomi dalam hubungan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, struktur dan kekuasaan, serta keseimbangan antara perusahaan kapitalis dan publik. Fokus analisisnya pada kajian media menekankan aspek historis pada beberapa hal, yakni pertumbuhan media, perluasan jangkauan perusahaan media, komodifikasi dan perubahan peran negara serta intervensi pemerintah. Perspektif kritis tidak mengabaikan pilihan-pilihan produsen maupun konsumen industri budaya untuk menjelaskan posisi strategis media sebagai penentu citra dan realitas dunia.

Aplikasi teori ekonomi politik perspektif kritis menurut Golding dan Murdock (1991:22) adalah (1) *the production good meaning as the exercise of power*, (2) *the political economy of text*, (3) *the political economy of product consumption*. Analisis ekonomi-politik menurut Golding dan Murdock berkenaan dengan produksi makna sebagai praktik kekuasaan, analisis tekstual, dan konsumsi media.

Perkembangan ekonomi dan teknologi telah menggeser status masyarakat sebagai warga politik menjadi unit konsumsi dalam masyarakat korporasi. Hal mendasar apakah perubahan-perubahan berbagai kekuatan termasuk praktik kekuasaan terhadap produksi dan distribusi budaya membatasi atau memperluas ruang publik. Dua isu kunci berkenaan dengan hal tersebut adalah (1) pola kepemilikan institusi dan akibatnya pola penguasaan terhadap

aktivitas mereka dan (2) karakteristik hubungan antara pengaturan negara dan lembaga komunikasi.

Perspektif Golding dan Murdock membagi tiga varian perspektif ekonomi kritis, yakni (1) instrumentalisme, yang cenderung memandang media sebagai instrumen dominasi kelas dalam hal ini cara kapitalis menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengatur informasi yang sesuai kepentingan kapitalis untuk disajikan kepada publik. Peran agen atau kelompok tertentu sangat menonjol dan cenderung mengabaikan pengaruh faktor struktural. (2) Strukturalisme, cenderung melihat struktur sebagai suatu yang monolitik, mapan, statis, dan determinan serta mengabaikan potensi dan kapasitas agen sosial untuk memberi respons terhadap kondisi struktural. Pandangan ini menganggap struktur sebagai entitas solid, permanen dan tidak bisa dipindahkan. (3) Konstruktivisme, yang memandang struktur dan agen belum sempurna dan bergerak dinamis. Kehidupan media dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, politik, individu, dan seterusnya. Negara dan pemodal tidak selalu menggunakan media sebagai instrumen penundukan terhadap kelompok lain karena tidak ada praktik dominasi dan hegemoni. Struktur adalah entitas yang terus-menerus diproduksi dan diubah melalui praksis dan dinamikanya dipengaruhi aksi timbal balik antara struktur dan agen (Golding dan Murdock, 1991:15-32).

Varian instrumentalisme memandang bahwa pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonominya dalam sistem pasar komersial untuk menjamin alur informasi publik agar sesuai dengan misi-visinya (Triyono, 2012: 20). Instrumen dominan cenderung mengabaikan pengaruh faktor struktural dan terlalu menonjolkan peran agen sosial atau kelompok tertentu (ekonomi dan politik) dalam media. Dominasi digambarkan searah tanpa perlawanan. Instrumentalisme berasumsi bahwa media dikontrol dan melayani kepentingan kelas kapitalis. Pemilik media yang berada dalam struktural cenderung menganggap dirinya monolitik, mapan,

statis, dan determinan serta mengabaikan potensi dan kapasitas agen sosial untuk memberi respons dan berperan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik media dalam perspektif kritis Marxian untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana pekerja jurnalis bekerja dan praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis dengan melihat kontrol instrumen dominan untuk kepentingan kapital. Penelitian ini menggunakan pemikiran dalam varian instrumentalisme karena hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan bagaimana pemilik modal / pemilik media sebagai instrumen mapan berupaya mengontrol pasar untuk pemenuhan kepentingan kapital.

Teori Ekonomi Politik Marxian (*Marxian Political Economy*) meyakini bahwa pengaruh Karl Marx bersumber dari analisisnya terhadap industri kapitalis yang memunculkan pertentangan antara kaum borjuis (pemilik modal) dengan kaum proletar (pekerja). Borjuis memiliki kekuatan alat produksi untuk mendapatkan keuntungan dan memengaruhi struktur sosial melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar yang bergantung pada kegiatan produksi. Dua faktor penting penentu perubahan sejarah manusia yang menjadi tekanan Karl Marx adalah alat-alat produksi (*means of production*) dan hubungan dengan proses produksi (*relation of production*). Dua aspek ini yang digunakan peneliti untuk mengkaji fenomena kerja jurnalis dan praktik jurnalistik dalam industri media kapitalis dengan mengkombinasikan dengan metode fenomenologi transcendental Husserl untuk melihat dan memahami fenomena secara holistik.

Pendekatan kritis studi media dipengaruhi gagasan-gagasan Marxis melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dominasi, dan media merupakan salah satu bagian dari sistem dominasi tersebut (Sudibyo, 2000:117). Dalam pandangan kritis, Mark Schulman menggambarkan mekanisme pengendalian organisasi

media terhadap pekerjanya (Downing, Mohammadi, dan Sreberny-Mohammadi (ed), 1990:115 dalam Perwirawati,2012), sebagai berikut :

1. Sensor diri, kontrol dilakukan halus dan tidak kentara. Bentuk sensor dalam penghukuman dan imbalan. Dalam bekerja bukan diatur dalam proses dan pembagian kerja seperti dalam pandangan plural melainkan dari kontrol kesadaran kelas kelompok elit yang sengaja mengontrol dan memberikan hukuman jika tidak menaati proses. Dalam konteks ini pekerja media tunduk pada pemilik media.
2. Pertimbangan ideologis. Semua proses dan kerja bukan berdasarkan landasan etis dan profesionalitas tetapi pertimbangan ideologi dominan media yang dianggap sebagai sesuatu yang kekal dan harus dipatuhi.
3. Profesionalisme sebagai kontrol. Praktik pendisiplinan pekerja media dengan berbagai aturan professional, pekerja media tidak bebas dan bertindak sesuai kontrol mekanisme yang ditentukan. Cara ini digunakan organisasi media untuk mengontrol pekerjanya termasuk pekerja yang terlatih dan berbakat sekalipun.
4. Pembatasan teknologi. Organisasi media secara tidak langsung dan tanpa disadari melakukan pembatasan teknologi karena sarana dan prasarana (alat produksi) yang digunakan pekerja merupakan inventaris sehingga proses kerja dapat dikontrol.
5. Pekerja bertujuan mencari kesenangan. Pekerja media adalah pekerja, sebagai salah satu pemain dari serangkaian pekerja dengan posisi berbeda. Kebenaran juga tidak mutlak karena tercipta dari sikap elit yang mempunyai peluang, posisi dan kesempatan mengkonstruksi wacana. Pada akhirnya, pekerja media harus merasakan ketidaknyamanan dalam menutupi hal buruk. Batas kesadaran dari

pekerjaan yang mengikat pekerja adalah nilai dan sikap dalam diri untuk melakukan sesuatu dengan kebenaran, pertimbangan, kreatifitas dan seni.

1.5.3.1. Nilai Kerja

Pekerjaan (Schacht; 2005:109) merupakan aktifitas dimana manusia mendapatkan eksistensi dirinya dan mengembangkan kemampuan psikis dan fisik secara bebas karena itu pekerjaan harus dapat menjadi alat pemuas atas kebutuhan diri bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pekerjaan harus bersifat sukarela dan bebas sehingga aktifitasnya mempunyai nilai lebih yang dapat mengasah ketrampilan dan potensi diri. Dalam “Manuscripts” Karl Marx menggunakan istilah pekerjaan atau pekerja untuk menyebut bentuk pekerjaan menyimpang yang ada dalam masyarakat kapitalis modern.

Pandangan tentang manusia dapat dipahami melalui filsafat pekerjaannya dan mengemukakan empat hal mengenai makna kerja, yakni: (1) Pekerjaan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mencapai kepuasan atau puncak homeostasis. (2) Pekerjaan yang dihasilkan dari eksplorasi bakat dan kemampuan menjadi realiasi potensi manusia sehingga dengan bekerja semakin hidup dan eksis. (3) Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang dimaknai melalui aktivitas kerja sebagai sosialitas untuk mendapatkan penghargaan atas pekerjaan dan peneguhan diri. (4) Pekerjaan manusia meninggalkan obyek-obyek sejarah. Keempat hal ini menunjukkan bahwa bekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia untuk membangun dunia sesuai dengan hakikat kemanusiaannya.

Menurut Karl Marx, pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling mendasar untuk menunjukkan eksistensi manusia yang nyata sebagai makhluk sosial, karena itu penerimaan

dan penghargaan hasil kerja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain (Suseno, 1999: 92-93). Artinya, interaksi dalam bekerja harus memerhatikan tujuan pribadi dan orang lain sehingga kebutuhan berbagai pihak terpenuhi. Pada dasarnya kepuasan tercapai jika seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan pribadi dan tujuan perusahaan.

Menurut Marx, kapital adalah bahan-bahan baku, instrumen kerja, dan seluruh jenis alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses produksi dan seluruh komponen itu dihasilkan melalui kerja yang dilakukan tenaga kerja. Marx menegaskan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Berdasarkan pemikiran tersebut, selanjutnya Karl Marx menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem produksi kapitalis, terdapat dua kelas yang saling berhadapan yakni kelas buruh/pekerja dan kelas pemilik modal yang keduanya saling membutuhkan namun hubungan antara dua kelas tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi yang memberi dampak alienasi. Karl Marx (dalam Berger, 1998: 53) mengambil istilah keterasingan untuk menunjukkan pemisahan dan jarak dalam suatu masyarakat karena tidak memiliki koneksi dengan orang lain, tanpa ikatan, tidak memiliki apa pun.

Karl Marx menganalisis bentuk yang muncul dari hubungan diri dengan pekerjaan di bawah kapitalisme mengabaikan tujuan tanpa objektivasi dan sebagai gantinya hanya bekerja sesuai dengan tujuan sang kapitalis yang mengupah dan membayar. Struktur-struktur kapitalisme menyebabkan alienasi sehingga Karl Marx menggunakan konsep alienasi (keterasingan) untuk mengungkap efek produksi kapitalis yang bersifat menghancurkan atau merusak manusia dan benda yang dihasilkan. Alienasi terjadi karena kapitalisme berevolusi menjadi sistem dua kelas, yakni:

1. Kaum kapitalis yang memiliki alat-alat produksi dan memiliki produk-produk hasil akhirnya.
2. Kaum pekerja yang terpaksa menjual waktu kerjanya kepada kaum kapitalis agar dapat bertahan hidup.

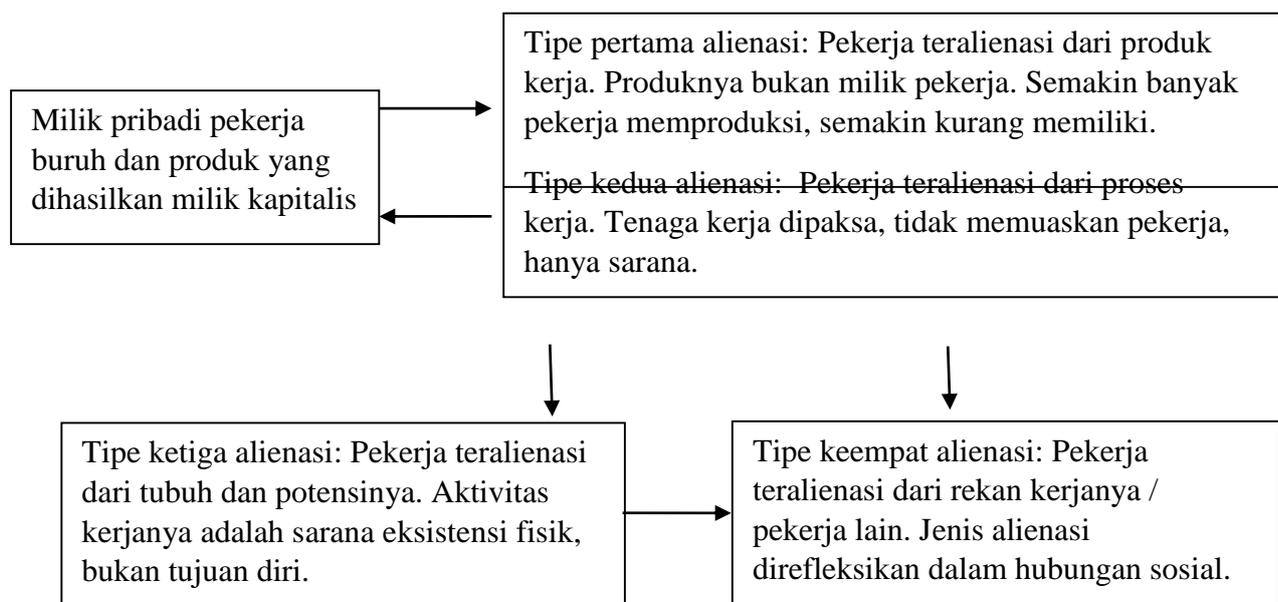
Pemikir Marxis cenderung melihat pada eksploitasi, alienasi, manipulasi, dan ideologi setiap produk populer. Karena itu Marx menentang struktur-struktur kapitalisme dan dampaknya yang menindas terhadap para aktor sehingga manusia harus dibebaskan dari struktur-struktur kapitalisme yang menindas (Ritzer, 2012:41-42).

Hubungan inheren antara kerja dan sifat dasar manusia tidak berjalan baik jika hubungan tersebut disalahgunakan oleh kapitalisme. Marx menyebut hubungan yang diselewengkan ini dengan alienasi karena manusia tidak lagi melihat kerja sebagai sebuah ekspresi dari tujuan. Dalam sistem kapitalisme, kerja menjadi sarana mencapai tujuan memperoleh uang, bukan tujuan diri sebagai wujud kemampuan dan potensi. Pekerjaan tidak menjadi ungkapan dari kemampuan kreativitas dan produktivitas seseorang, melainkan mengasingkan manusia dari dirinya sendiri maupun orang lain. Manusia terasing dari dirinya sendiri ketika aktivitas produktifnya tidak berdasarkan ide-ide mereka sendiri melainkan berdasarkan para kapitalis sebagai pemilik otoritas. Menurut Marx, bekerja menjadi sarana yang membosankan dan mematahkan semangat manusia demi sekadar memenuhi tujuan utama yaitu memperoleh cukup uang untuk bertahan hidup. Karl Marx membagi manusia ke dalam dua kelompok, kaum proletar (buruh) dan kaum borjuis (pemilik modal) yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Kaum proletar bekerja untuk mendapatkan upah, sedangkan para borjuis menekan para buruh untuk mendapatkan keuntungan.

Bekerja sudah semestinya memberikan kepuasan, tetapi dalam kenyataan yang sering terjadi justru keterpaksaan. Kebanyakan individu khususnya buruh industri dalam sistem

kapitalisme bekerja tidak merealisasikan hakikat hidup tetapi justru mengasingkannya. Karl Marx mengungkap, dalam sistem kapitalisme, orang tidak bekerja secara bebas dan universal melainkan semata-mata terpaksa sebagai syarat untuk hidup (Suseno, 2003:95). Pekerjaan tidak mengembangkan melainkan mengasingkan manusia, baik dari diri sendiri maupun orang lain.

Alienasi dalam pandangan Karl Marx berhubungan dengan kondisi pekerja. Dari *Economic and Philosophic Manuscript of 1844*, Marx membuat ringkasan atau rangkuman mengenai alienasi pekerja buruh, sebagai berikut:



Sumber: Summary of Marx's "Estranged Labor" from *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*

Menurut Karl Marx kaum proletar memiliki tiga dimensi keterasingan, yakni terasing dari dirinya sendiri, terasing dari produknya, dan terasing karena memperalat dirinya sendiri untuk mencari nafkah. Jika seseorang sudah terasing dari hakikatnya maka terasing dari sesama manusia lainnya karena setiap orang memiliki kepentingan berbeda dan saling berkontradiksi.

Buruh dan pemilik modal saling bertentangan dan di antara sesama buruh juga terjadi pertentangan dalam merebut tempat bekerja.

Tenaga kerja menduduki tempat sentral dalam pemikiran ekonomi karena sejarah manusia telah dipaksa untuk hidup di alam keharusan yang menuntut tenaga manusia (Mosco, 2009:35). Karl Marx (dalam Suseno, 2003:95-99) menjelaskan konsep keterasingan dalam pekerjaan, yakni:

1. Terasing dari diri sendiri. Keterasingan dari diri sendiri memiliki tiga aspek, yakni a) pekerja merasa terasing dari produknya; b) produk terasing dari pekerja karena kehilangan makna dari tindakan pekerjaannya; c) keterasingan dalam pekerjaan dapat dilihat dari pekerjaan sebagai tindakan hakiki manusia hanya diperalat untuk tujuan memperoleh nafkah. Kondisi tersebut mengakibatkan manusia memeralat dirinya sendiri.
2. Terasing dari orang lain. Manusia terasing dari hakikatnya sekaligus terasing dari sesamanya. “Konsekuensi langsung dari keterasingan manusia dari produknya, dari kegiatan hidupnya (proses produksi). Secara empiris, keterasingan dari sesama menunjukkan kepentingan yang berlawanan. Ada dua arah: a) dalam sistem hak pribadi, mereka yang bekerja di bawah kekuasaan para pemilik membuat masyarakat terpecah dalam dua kelas yang saling berlawanan karena kepentingan bertentangan yakni kelas para pekerja dan kelas para pemilik. Pemilik harus berusaha menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengurangi biaya upah dan fasilitas pekerja lain. Para pekerja berkepentingan mendapat upah kerja setinggi-tingginya dan syarat-syarat kerja yang baik. Kaum buruh dan para pemilik terasing satu sama lain.

Kekuasaan uang menjadi tanda-tanda keterasingan. Manusia melakukan tindakan sejauh mungkin untuk menghasilkan uang, bukan untuk menilai dirinya sendiri atau demi kebutuhan sesama. Fakta keterasingan dari manusia lain terlihat jelas dalam sikap egois hanya memenuhi kebutuhan orang lain sejauh dapat memperoleh keuntungan, bukan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi meskipun mampu.

Sementara Karl Marx (dalam Ritzer, 2012:89-91) menjelaskan konsep alienasi dalam empat komponen mendasar, sebagai berikut:

1. Para pekerja dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari kegiatan produktifnya. Mereka tidak menghasilkan objek-objek menurut ide-ide mereka sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara langsung, tetapi bekerja untuk kaum kapitalis dengan imbalan atau upah. Kegiatan produktif menjadi milik kaum kapitalis yang mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan, sehingga para pekerja teralienasi dari kegiatan itu. Tugas-tugas mengaburkan peran dalam proses produksi keseluruhan.
2. Para pekerja dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari objek kegiatan produknya. Produk pekerjaannya bukan milik para pekerja, melainkan milik para kapitalis yang mungkin digunakan sesuai keinginan karena menjadi hak milik pribadi dan digunakan untuk mendapat keuntungan.
3. Para pekerja dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari para rekan kerjanya. Asumsi Marx, pada dasarnya orang butuh dan ingin bekerjasama untuk bertahan hidup tetapi kapitalisme mengganggu kerjasama tersebut dan sering memaksa pekerja memasuki kompetisi dengan mengatasnamakan produktivitas. Prinsip kerja tim berubah menjadi prinsip ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak, bekerja lebih cepat, atau lebih banyak menyenangkan pemilik.

4. Para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari potensi kemanusiaannya sendiri. Hakikat manusia menganggap tempat kerja menjadi tempat individu merasa paling kurang sebagai manusia, sehingga apabila semakin sedikit bekerja maka semakin tersusutkan dalam pekerjaannya. Bekerja hanya sebagai aktivitas fisik, bukan sebagai eksistensi diri terhadap tujuan idealisme profesi.

Karl Marx berpendapat, semakin keras orang bekerja dalam masyarakat kapitalis, maka semakin merasa terasing sehingga mencari “pelarian” dengan berbagai bentuk. Marx membangun analisis kritisnya atas kontradiksi-kontradiksi masyarakat kapitalis berlandaskan premis-premisnya mengenai potensi manusia, hubungannya dengan pekerjaan, dan potensi alienasi di bawah kapitalisme. Ada suatu kontradiksi nyata antara potensi manusia dan keharusan cara mereka bekerja di dalam masyarakat kapitalis. Hubungan antara orang dan struktur-struktur skala besar yang diciptakan. Di satu sisi membantu orang memenuhi dirinya sendiri, tetapi di sisi lain menjadi ancaman bagi hakikat manusia (Beilharz, 2005a; Cooper, 1991; Meisenhelder, 1991 dalam Ritzer, 2012:87).

Pekerjaan yang teralienasi atau alienasi dari pekerjaan berkaitan dengan: (1) ketidakpuasan kerja, (2) perasaan bahwa pekerjaan tidak memuaskan secara intrinsic, dan (3) ketidakpuasan terhadap tingkat dimana pekerjaan mengarahkan diri, bermakna, dan mengekspresikan diri. Semua hal tersebut berkaitan dengan kondisi dalam situasi kerja yang menjadi focus ketidakpuasan tersebut (Schacht; 2005:223-224).

Penekanan alienasi menurut pandangan Marx lebih pada perasaan pekerja terhadap kurangnya rasa memiliki peralatan dan arti dari produksi karena kurangnya kesempatan menikmati manfaat dari pekerjaannya. Pekerjaan dianggap sebagai keharusan untuk bertahan hidup dan tidak berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan diri. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kapitalisme mungkin dapat memproduksi barang dan materi berlimpah bagi orang

banyak, tetapi disadari atau tidak, orang-orang yang terasing menderita karena hal ini. Orang-orang yang hidup dalam keterasingan (atau kondisi keterasingan) mengalami "kesadaran palsu", kesadaran yang membawa mereka untuk mengikuti pemikiran dominan. Erich Fromm (2004) menambahkan, keterasingan kerja akibat "keterpaksaan" dalam melakukan pekerjaannya karena kepatuhan menghilangkan identitas sentral dan kedirian seseorang, sehingga ketika merasa terasing yang muncul adalah kekuatan yang merusak.

Kovach dan Rosenstiel (2001:68) mengatakan, pertarungan sesungguhnya bukan nilai-nilai melainkan perubahan yang sudah semestinya terjadi yakni pertarungan untuk kelangsungan industri pada era bisnis jurnalisme yang semakin terbuka dan bersaing ketat. Dinding pemisah antara bidang redaksi dan bidang perusahaan mulai runtuh. Independensi jurnalistik di ruang redaksi membiarkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan kekuasaan pemilik media ikut membentuk berita sehingga banyak jurnalis berpikir redaktur telah menghilang "di balik dinding".

Dalam konteks penelitian ini, konsep nilai kerja Karl Marx digunakan untuk mendeskripsikan hubungan kerja dan cara-cara kapitalis menggunakan kekuatan kapital yang dimiliki untuk mengendalikan praktik jurnalistik dengan mengintervensi, mengeksploitasi dan menindas pekerja jurnalis sehingga menyebabkan perubahan sikap kerja dalam berbagai bentuk dan mengakibatkan pekerja teralienasi.

Sesuai dengan fokus penelitian ini maka peneliti menguraikan tentang bagaimana praktik kerja jurnalis. Nilai kerja menjadi konsep utama dalam penelitian ini dan digunakan untuk menjawab bagaimana dampak praktik kerja jurnalis yang bekerja dalam industri media kapitalis. Peneliti juga ingin menguji sejauhmana konsep dari Karl Marx dapat diterapkan dalam industri media kapitalis yang mempunyai karakteristik berbeda dengan industri manufaktur pada umumnya yang selama ini menjadi acuan kerangka pikir Karl Marx.

1.5.4. Asumsi Penelitian

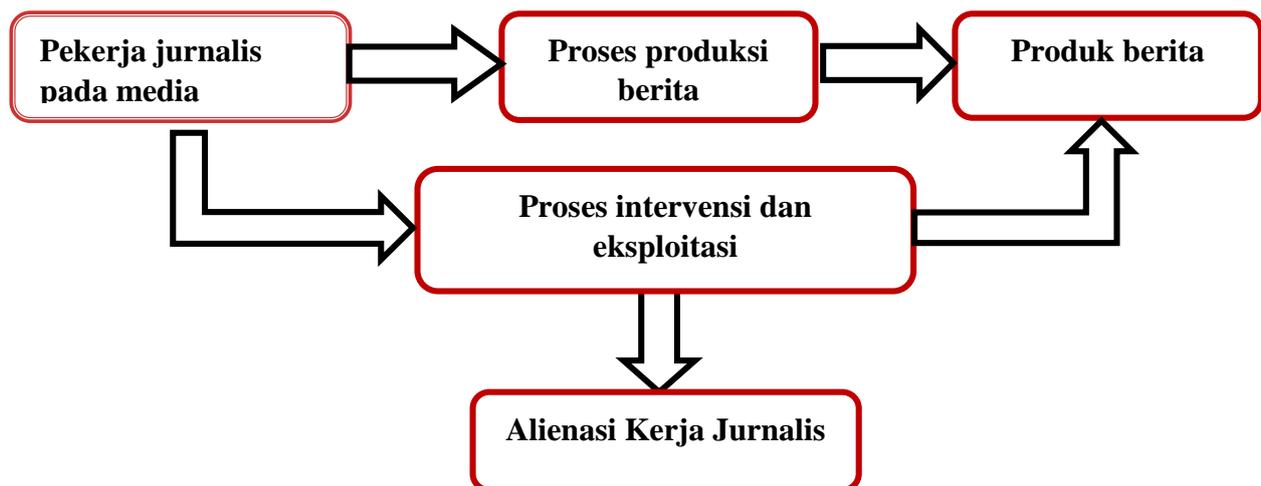
Asumsi teoritis penelitian merupakan komponen untuk mendapatkan sebuah gambaran lengkap mengenai sebuah fenomena melalui pengalaman langsung. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Maurice Merleau-Ponty (Littlejohn, 2012:57) menulis bahwa “semua pengetahuan akan dunia diperoleh dari beberapa pengalaman di dunia sehingga pengalaman nyata itu digunakan sebagai data pokok sebuah realitas”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial” yang berarti bahwa media massa berperan sebagai ruang diskusi dan ruang publik sehingga dalam bekerja, jurnalis harus mempunyai kecakapan khusus yang mengacu pada kode etik dan tidak tunduk pada kepentingan apapun kecuali bertanggung jawab pada kepentingan publik, meskipun media massa berfungsi sebagai entitas bisnis.

Industri media yang ditandai dengan konglomerasi dan oligarki media sering mengabaikan fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial tersebut. Pengaruh media yang sangat besar lebih dominan digunakan untuk melancarkan kepentingan ekonomi dan politik pemilik media / pemodal. Praktik bisnis dan kekuasaan di bawah satu atap organisasi media mempunyai konsekuensi merusak dan berlawanan dengan kepentingan utama jurnalisisme.

Pekerja jurnalis yang bingung dan ambigu tentang loyalitas mempunyai konsekuensi nyata dengan dua pilihan yakni konsekuensi loyalitas pada publik atau loyalitas pada kepentingan pribadi organisasi media yang lebih mementingkan bisnis dan kapital. Dalam industri media kapitalis muncul fenomena bahwa pekerja jurnalis sebagai garda depan pembawa pesan yang seharusnya berpihak kepada publik cenderung berbalik memihak kapitalis dengan lebih mengedepankan kepentingan bisnis, ideologi dan politis pemilik modal. Pekerja jurnalis yang kehilangan keberpihakan kepada publik, profesi, dirinya sendiri sangat bertentangan dengan prinsip jurnalisme mengakibatkan perubahan sikap kerja jurnalis menjadi teralienasi. Kondisi tersebut secara umum yang dialami dan tidak disadari pekerja jurnalis ternaturalisasi dalam sebuah idealisme semu dan kesadaran palsu profesi dengan lebih memilih mengikuti pemikiran dominan yang cenderung merusak tatanan kehidupan dan dunia jurnalistik secara khusus sehingga terjadi dehumanisasi.

1.6. Operasionalisasi Konsep



Sumber: Hasil oleh penulis

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk menjelaskan konsep utama penelitian serta penggunaannya. Konsep utama dalam penelitian ini adalah nilai

kerja dari pemikiran Karl Marx yang digunakan untuk mengupas fenomena intervensi dan eksploitasi kerja jurnalis dan praktik kerja jurnalistik dalam kapitalisme media di Indonesia yang mengakibatkan alienasi kerja.

Dalam konteks penelitian ini, kapitalisme perusahaan media menyebabkan pekerja jurnalis teralienasi. Bentuknya / tipe alienasi berupa alienasi dari produk, proses produksi, rekan kerja, dan potensi diri dalam hal ini hakikatnya sebagai manusia. Perusahaan media dalam sistem kapitalis cenderung mengabaikan pengaruh faktor struktural yang didalamnya terdapat pekerja jurnalis dan justru terlalu menonjolkan peran agen sosial atau kelompok tertentu dalam hal ini pemilik modal serta fokus pada cara-cara kapitalis menggunakan kekuatan media untuk kepentingan ekonomi politik. Pendekatan konsep Karl Marx ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan dampak praktik kerja jurnalistik dalam industri media kapitalis di Indonesia.

Pekerja jurnalis menjadi bagian dalam sebuah sistem kerja keredaksian di perusahaan media yang bertugas melakukan serangkaian kegiatan proses produksi berita untuk menghasilkan produk berita yang berupa konten-konten dengan kuota atau kuantitas tertentu untuk dijual dengan menggunakan wadah media. Pekerja jurnalis tidak dapat bebas melakukan pekerjaannya karena banyak aspek yang mengintervensi proses produksi yakni intervensi internal dan eksternal. Intervensi internal terjadi secara langsung di dalam ruang redaksi yang melibatkan personil di dalam struktur keredaksian, pemilik modal dan kebijakan perusahaan media secara umum. Intervensi eksternal terjadi dalam proses produksi berita yang memengaruhi produk berita baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan objek liputan dan rekan kerja. Kecakapan dan profesionalisme kerja dalam diri pekerja jurnalis juga memengaruhi proses produksi dan hasil produk.

Struktur dan personil dalam sistem keredaksian pada media kapitalis juga melakukan eksploitasi kepada pekerja jurnalis untuk tujuan kapital. Intervensi dan eksploitasi yang ada dalam keseluruhan praktik kerja jurnalistik tersebut tidak dapat di hindari dan tidak dapat di lawan karena pekerja jurnalis bekerja dalam sebuah sistem keredaksian yang harus mematuhi semua arahan, aturan, dan perintah personil di struktur redaksi dan pemilik modal.

Kerja jurnalistik seharusnya ditentukan berdasarkan nilai produk berita yang berorientasi pada kepentingan publik tetapi kepentingan kapital ekonomi politik yang berkelindan dalam kegiatan produksi menyebabkan kualitas produk berita menjadi rendah dan tidak sesuai prinsip jurnalisme. Kegunaan pekerjaan jurnalis bukan ditujukan untuk kepentingan publik secara utuh melainkan sekadar memenuhi tuntutan kepentingan kapitalis dan sarana pemenuhan kebutuhan hidup melalui upah kerja yang diterima.

Pekerja jurnalis yang bekerja di perusahaan media yang menerapkan sistem kapitalisme harus memasuki kompetisi dengan mengatasnamakan produktivitas. Proses produksi berita membutuhkan kerjasama yang solid dari semua unsur di redaksi termasuk pekerja jurnalis. Prinsip kerja tim berubah menjadi prinsip ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak, bekerja lebih cepat, atau lebih banyak menyenangkan pemilik. Orientasi pribadi, kompetisi, kecemburuan, kesenjangan dan motif atau tujuan kerja menyebabkan pekerja jurnalis dan rekan kerja tidak dapat bekerjasama menghasilkan produk berita yang berkualitas.

Bekerja hanya sebagai aktivitas fisik untuk tujuan material pemenuhan kebutuhan hidup, bukan sebagai eksistensi diri terhadap tujuan idealisme profesi yang harus dipegang teguh. Pekerja jurnalis dalam bekerja tidak dapat mengembangkan diri karena menjadi “mesin” penghasil informasi yang patuh menerima perintah dalam kebijakan terstruktur daripada bertugas pembawa pesan untuk pencerahan publik. Nilai kerja ini juga digunakan

peneliti untuk mendeskripsikan perubahan sikap pekerja jurnalis dalam upaya pembebasan diri dari intervensi dan eksploitasi kerja yang dialami dalam industri media kapitalis.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dalam paradigma kritis dengan desain penelitian fenomenologi transcendentale Edmund Husserl untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai suatu fenomena sosial dan hubungan yang terdapat di dalamnya. Penelitian kualitatif (Poerwandari;1998:17) dilakukan untuk mengembangkan pemahaman. Penelitian kualitatif membantu mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa, latar belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Pengembangan hukum tidak menjadi tujuan penelitian, upaya-upaya mengendalikan atau meramalkan juga tidak menjadi aspek penting. Aspek subjektif manusia menjadi hal yang terpenting.

Fenomenologi adalah jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pengalaman hidup manusia untuk mendapatkan pemahaman tentang “kebenaran” esensial dari pengalaman hidup (Sobur, 2013: X). Tujuannya menggambarkan esensi pengalaman sehingga menekankan pada deskripsi daripada penjelasan atas semua hal meski tetap memperhatikan sudut pandang bebas dari hipotesis. Peneliti melihat fenomenologi dapat menjadi alat untuk

menjawab tujuan penelitian ini dalam mendeskripsikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik jurnalistik dan kerja jurnalis dalam industri media kapitalis.

Konsep fenomenologi Husserl dipengaruhi konsep pemahaman dari Max Weber yang menyatakan bahwa realitas adalah untuk dipahami bukan untuk dijelaskan. Dalam konteks penelitian ini maka pendekatan fenomenologi *transcendental* melalui pendekatan kritis digunakan peneliti untuk melihat dalam konteks yang luas, tidak hanya pada sebuah level pekerja jurnalis saja namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan dalam proses praktik kerja jurnalistik. Dalam konteks penelitian ini maka peneliti tidak hanya melihat bagaimana praktik jurnalistik dan proses kerja jurnalis dalam industri media kapitalis. Namun juga melihat bagaimana konteks atau suasana sosial, politik, budaya hingga ekonomi saat pekerja jurnalis bekerja. Bahkan juga mengeksplorasi bagaimana motivasi dan persepsi kerja jurnalis, karir dan kondisi kerja, hubungan kerja jurnalis, bagaimana proses produksi berita yang melibatkan banyak aspek, ruang redaksi, kepentingan pemilik modal, dan ideologi yang dianut media.

Fenomenologi merupakan cara yang digunakan untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Maurice Merleau-Ponty (Littlejohn, 2012:57) menulis bahwa “semua pengetahuan akan dunia diperoleh dari beberapa pengalaman di dunia sehingga pengalaman nyata itu digunakan sebagai data pokok sebuah realitas. Stanley Deetz (Littlejohn, 2012:57) menyatakan tiga prinsip dasar fenomenologi yakni pengetahuan yang ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, makna benda dalam kehidupan seseorang dan bahasa sebagai sarana pemaknaan.

Fenomenologi bukan seperangkat doktrin tetapi pada umumnya ditandai sebagai cara untuk melihat (Moran, 2002:1). Pendekatan fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas sebuah keadaan (menerangi dunia) sebagai titik awal memberi berbagai

kemungkinan deskripsi fenomena yang muncul seperti merasakan kesadaran mengidentifikasi dalam berbagai hal yang dalam istilah Edmund Husserl disebut “esensi”. Objek investigasinya berupa hal-hal material, teks, pidato, emosi dan lain-lain yang dipelajari dengan secermat mungkin. Mendeskripsikan keraguan perseptor, pra-anggapan teoritis dan praktis, anggapan umum atau makna historis untuk menemukan makna tersembunyi, terselubung, baru, aspek tak terduga atau makna asli. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui fenomenologi reduksi yang pada dasarnya adalah sebuah ambisi untuk pengandaian pra-anggapan dalam berbagai golongan untuk menghasilkan persepsi bebas dari apa yang sudah diketahui (Gothlin, 1991: 193, Luckmann 1978: 8 dalam Holm and Liinason, 2007:7).

Fenomenologi dengan pendekatan ini setidak-tidaknya melakukan dua derivasi melalui fenomenologi Husserlian, yakni melihat sisi interpretasi dan makna dari temuan bagaimana objek dikemukakan dengan menggunakan terminologi Husserl. Peneliti membuat signifikansi aktor terikat dan subjektif, bukan sebagai pengamatan terpisah dan berimbang (Lester 1999 dalam Holm&Liinason, 2007). Desain penelitian fenomenologi transcendental Husserl mempunyai empat langkah yakni, epoche, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi dan pemaknaan yang mengarahkan pada hasil akhir.

Sisi interpretasi penelitian merupakan persepsi individu peneliti yang mengarahkan dan menuntun pada sebuah “kebenaran” dengan melakukan reduksi deskripsi fenomena eksternal dan internal, hubungan antara fenomena dengan mengacu pada kualitas data-data yang diperoleh pada proses pengumpulan data yang terkait dengan konteks untuk menemukan tema-tema tekstual. Sedangkan makna dari temuan dilakukan dengan memvariasikan kerangka acuan dan perspektif dengan menggunakan polaritas dan pembalikan, murni imajinatif dan tidak empiris untuk memperoleh tema struktural yang merupakan kondisi untuk melihat sesuatu sebagai “kebenaran akhir”.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dilakukan di Kota Semarang sebagai salah satu Kota besar dan ibukota provinsi di Indonesia. Semarang menjadi wilayah strategis bagi perusahaan media untuk mengembangkan bisnisnya sehingga di Kota ini banyak pekerja jurnalis yang bekerja di berbagai jenis media baik cetak, siber, televisi dan radio dengan skala lokal, nasional dan internasional.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pekerja jurnalis di Kota Semarang yang melakukan proses jurnalistik di lapangan dan redaksi. Jurnalis berada pada level pertama yang bertugas mencari, menggali, mengolah dan menyusun informasi menjadi produk berita.

Peneliti memilih enam pekerja jurnalis di Kota Semarang yang bekerja di perusahaan media baik media cetak, siber, televisi, dan radio. Peneliti tidak mengategorikan pada jenis media dengan pertimbangan pekerja jurnalis terbiasa berpindah bekerja pada jenis media berbeda. Peneliti mengidentifikasi pekerja jurnalis dengan menggunakan tiga tingkatan yang diklasifikasikan Dewan Pers berdasarkan masa kerja yakni pemula, madya, dan utama untuk memudahkan pencarian target responden. Klasifikasi tingkatan sebagai acuan peneliti menemukan calon responden untuk melihat pengalaman kerja dan kecenderungan umum dinamika kerja jurnalis. Tingkatan pertama, pekerja jurnalis pemula dengan masa kerja nol hingga lima tahun. Tingkatan kedua, pekerja jurnalis madya yang kerja lima tahun hingga 10 tahun dan tingkatan ketiga pekerja jurnalis utama dengan masa kerja 10 tahun lebih.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data data dalam penelitian ini berupa deskripsi kata-kata, kalimat, ekspresi dan tindakan dari subjek penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer memuat hasil temuan penelitian yang diperoleh dengan menggali data secara langsung oleh peneliti berdasarkan pengalaman historis pekerja jurnalis dari awal sebelum bekerja dan pada saat bekerja menjalankan profesi jurnalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung maupun langsung berkaitan dengan konteks penelitian yang ada di luar sumber utama yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penggalan data wawancara mendalam dan probing dengan subjek penelitian. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh berbagai informasi secara intensif untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dengan tanya-jawab tatap muka atau dengan berbagai cara melalui surat elektronik dan jaringan pribadi di aplikasi pesan instan media sosial.

Sumber primer diperoleh dari narasumber kunci yakni pekerja jurnalis di Semarang yang bekerja di media cetak, siber, televisi, dan radio. Data sekunder diperoleh melalui wawancara sumber sekunder dan sumber lainnya yang relevan dengan konteks penelitian dan subjek penelitian seperti pekerja jurnalis, Federasi Serikat Pekerja Media dan Dewan Pers. Data sekunder lain di luar sumber utama studi pustaka seperti seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, berita, film dan lain sebagainya.

Penggambaran utuh dan lengkap dapat digali dengan menekankan konsep *how* dan *why* untuk memahami secara mendalam (*verstehen*). Data juga diperoleh dengan pengamatan (*observasi*) terhadap pekerja jurnalis. Informasi yang diperoleh adalah ruang (tempat) kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu dan perasaan. Observasi ini dapat menghasilkan gambaran realistik perilaku atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan dan membantu memahami perilaku manusia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak agar benar-benar memahami persepsi subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena sehingga peneliti dapat melakukan observasi terlibat (*participant observation*) untuk memperoleh pemahaman terhadap subjek secara mendalam..

1.7.6. Unit Analisis Penelitian

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan prosedur fenomenologi *transcendental* Husserl untuk menjelaskan makna dari objek-objek pengalaman melalui penelitian tentang cara-cara penampakan mereka (Sobur, 2013:29).

Dalam konteks penelitian yang membahas tentang alienasi kerja jurnalis dalam industri media maka unit analisisnya berupa persepsi dan motivasi kerja jurnalis, karir kerja jurnalis, kondisi kerja jurnalis, hubungan kerja jurnalis yang meliputi elemen 4 hubungan kerja, efek kerja jurnalis meliputi 4 elemen dan perubahan sikap kerja jurnalis.

1.7.7. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Pendekatan fenomenologis *transcendental* Husserl sangat membantu untuk memandang fenomenologi sebagai kritik untuk mengeneralisasikan pengalaman manusia dengan dua cara (Finley, 2009):

1. Sebagai kritik terhadap asumsi yang tidak kritis menginformasikan model teoritis subjektivitas manusia.
2. Sebagai "kritik" dalam arti mampu menceritakan kondisi yang diperlukan untuk melihat kemungkinan subjektivitas manusia pada setiap klaim pengetahuan.

Aspek fenomenologi *transcendental* ini berusaha menggali perangkat kesadaran manusiawi yang esensial dan saling berkaitan (Bagus dalam Sutrisno dan Hardiman, 1992:88-89 dalam Sobur, 2013:43-48). Husserl mengemukakan empat tahapan penelitian fenomenologi, yakni (Moustakas,1994: 33-37) :

1. *Epoche*. Proses epoh merupakan data awal yang diperoleh dari pengumpulan data yang tidak bisa dirasakan dan diidentifikasi tanpa refleksi internal dan makna karena hanya persepsi individu yang mengarahkan pada kebenaran.
2. *Reduksi fenomenologi*. Analisis data dilakukan dengan mereduksi deskripsi fenomena yang dilihat secara internal dan eksternal, hubungan antara fenomena dan diri. Data dilihat dan dijelaskan berulang kali (*direduksi*) dengan mengacu pada kualitas data kasar dan halus, kecil dan besar yang terkait dengan konteks yang disebut pengurangan (*reduksi*) karena mengarah kembali ke pengalaman diri sendiri dari hal-hal yang dialami (Schmitt, 1968: 30). Proses ini tidak pernah berakhir dan tidak terbatas.
3. *Variasi imajinasi*. Peneliti dapat memperoleh tema struktural dengan memvariasikan kerangka acuan dan perspektif dengan polaritas dan pembalikan. Pada tahap ini, intuisi adalah murni imajinatif dan tidak empiris.
4. *Sintesis Makna dan Esensi*. Esensinya adalah kondisi atau kualitas untuk melihat sesuatu sebagai “kebenaran akhir”.

Berdasarkan teknik analisis tersebut maka peneliti menggunakan seluruh rangkaian analisis yang dimulai dari proses epoh untuk menemukan gagasan topik dan pemilihan sampel penelitian berupa pekerja jurnalis, *reduksi fenomenologi* untuk mendapatkan tema-tema

tekstual berdasarkan hasil temuan-temuan, variasi imajinasi dengan menganalisis kerangka acuan dan perspektif subjek penelitian untuk menghasilkan tema struktural hingga menemukan hasil sintesis makna pengalaman dari subjek penelitian untuk mendapatkan hasil yang disebut sebagai “kebenaran akhir”.

1.8.7. Goodness Criteria (Kualitas Data)

Kualitas data penelitian menurut Egon G Guba dan Yvonna S Lincoln (1994:141) dapat dilihat dari paradigma atau perspektif yang digunakan peneliti, yakni berdasarkan pada aspek historis penelitian dengan mempertimbangkan gejala awal sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dari situasi yang diteliti untuk menghilangkan batas jangkauan dan tindakan penelitian untuk mengikis ketidaktahuan dan kesalahpahaman, untuk mengubah struktur yang ada. Kriteria kualitas penelitian menggunakan *historical situatedness*, di mana peneliti memperhatikan konteks historis, sosial budaya, ekonomi dan politik dari realitas kerja jurnalis dalam industri media.

1.8.8. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dan kelemahan penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan metodologis dengan pendekatan kualitatif yang mencoba menggabungkan tradisi fenomenologi yang konstruktif ke dalam paradigma kritis (konstruktif kritis). Dalam teoritis, peneliti hanya fokus pada konsep alienasi Karl Marx. Secara metodologis dilihat dari desain penelitian fenomenologis yang mempunyai kelemahan utama yakni kendala menggeneralisasikan dalam konteks yang lebih luas karena cara berpikir peneliti yang tidak

dapat menggambarkan pengalaman unik dan membuat generalisasi tentang pengalaman pada saat yang sama (Farber, 1968 dalam Sobur, 2013: xiii).

Peneliti juga tidak dapat memaksakan makna bagi subjek penelitian sebagai sumber mutlak yang berada dalam kehidupan dan lingkungannya sendiri. Peneliti kemungkinan besar tidak bisa melepaskan interpretasi dan subjektivitas pribadi dari hal-hal yang diteliti sehingga harus menyadari pengalamannya yang dimasukkan ke dalam wawancara dan analisis data.